

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD)
TAHUN 2025
KECAMATAN TULIS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah	16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	24
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Renja SKPD	
Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	27
3.3. Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan	37
BAB V PENUTUP	41

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tulis Kabupaten Batang ini disusun mendasari Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disahkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun 2024 ini, diharapkan Kecamatan Tulis sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tulis, 8 Juli 2024
Camat Tulis,



JOKO PRASETIJO, SKM. M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19701113 199103 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulis Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 oleh Kecamatan Tulis Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab.).

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulis Kabupaten Batang disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dalam menjalankan Rencana Pembangunan Daerah jangka menengah daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang - undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019–2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023 -2026

14. Keputusan Bupati Batang No. 14 Tahun 2003, tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh Kecamatan Tulis Kabupaten Batang
2. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tulis Kabupaten Batang

1.3.2. Tujuan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tulis Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2024.

1.3.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Renja Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun 2025

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Tulis, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Tulis serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Renja Kecamatan Tulis

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tulis

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Tulis serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Kecamatan Tulis Tahun 2023

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tulis Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tulis Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Tulis
Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tulis tahun 2023 dan realisasi Renstra Kecamatan Tulis mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulis
Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tulis berdasarkan indikator yang sudah ditentukan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tulis
Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Tulis, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tulis Kabupaten Batang
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tulis Kabupaten Batang
Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tulis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Tulis
- 3.3 Program dan Kegiatan.
Memuat uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan penjelasan-penjelasan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Program dan Kegiatan
Bagian ini menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2022 Kecamatan Tulis melaksanakan 4 program dan 11 kegiatan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang

telah ditetapkan sampai dengan tahun 2022 dapat terealisasi rata-rata 97 %, Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja baik dan tercapai 89,20%, Hampir semua kegiatan memenuhi target 100 %. Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2023 dengan usulan sebesar terurai dalam 4 program dan 11 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tulis sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia aparat kecamatan Tulis masih perlu ditingkatkan.
2. Koordinasi dengan dinas/instansi/satuan kerja dan *stakeholders* yang belum optimal.
3. Pemahaman tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah masih kurang.
4. Kurang tepatnya penentuan target dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2023 - 2026 dengan prediksi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sehingga nilai capaian kinerja menjadi berkurang walaupun pada kenyataannya hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tulis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tahun 2023-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Tulis Kabupaten Batang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kecamatan dan Desa dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, tercantumpada tabel TC.29 terlampir.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d 2023
Kabupaten Batang

OPD Kecamatan
: Tulis

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022				Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)			
										Target Renja PD Tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5	6		7		8=7/6*100	9		10=5+7+9		11=10/4*100
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	96	96	24		24		100%	120		120		100%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	96	96	24	Laporan	24	Laporan	100%	120	Laporan	120	Laporan	100%
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	48	48	12	Bulan	12	Bulan	100%	60	Bulan	60	Bulan	100%
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	48	48	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	60	Dokumen	60	Dokumen	100%
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	Laporan	96	96	24	Laporan	24	Laporan	100%	120	Laporan	120	Laporan	100%
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	Dokumen	48	48	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	60	Dokumen	60	Dokumen	100%
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	48	48	12	Laporan	12	Laporan	100%	60	Laporan	60	Laporan	100%

7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparaturnya yang disiplin	%	100	228	47	%	47	%	100%	350	%	275	%	79%
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	3	2	Paket	2	Paket	100%	5	Paket	5	Paket	100%
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	180	135	45	Orang	45	Orang	100%	225	Orang	180	Orang	80%
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	120	90	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	120	Orang	90	Orang	75%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	%	100	112	28	%	28	%	100%	140	%	140	%	100%
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	4	4	1	Paket	1	Paket	100%	5	Paket	5	Paket	100%
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	4	4	1	Paket	1	Paket	100%	5	Paket	5	Paket	100%
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Paket	4	4	1	Paket	1	Paket	100%	5	Paket	5	Paket	100%
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Paket	4	4	1	Paket	1	Paket	100%	5	Paket	5	Paket	100%
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	48	48	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	60	Dokumen	60	Dokumen	100%
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	48	48	12	Laporan	12	Laporan	100%	60	Laporan	60	Laporan	100%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	%	100	13	2	%	2	%	100%	10	%	15	%	150%
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Paket	4	5	1	Paket	1	Paket	100%	5	Paket	6	Paket	120%
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	4	8	1	Unit	1	Unit	100%	5	Unit	9	Unit	180%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	%	100	144	36	%	36	%	100%	180	%	180	%	100%

7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Laporan	48	48	12	Laporan	12	Laporan	100%	60	Laporan	60	Laporan	100%
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Laporan	48	48	12	Laporan	12	Laporan	100%	60	Laporan	60	Laporan	100%
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Laporan	48	48	12	Laporan	12	Laporan	100%	60	Laporan	60	Laporan	100%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Unit	17	17	8	Unit	8	Unit	100%	25	Unit	25	Unit	100%
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	5	5	5	Unit	5	Unit	100%	10	Unit	10	Unit	100%
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Unit	4	4	1	Unit	1	Unit	100%	5	Unit	5	Unit	100%
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas dan bangunan lainnya.	Unit	4	4	1	Unit	1	Unit	100%	5	Unit	5	Unit	100%
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	4	4	1	Unit	1	Unit	100%	5	Unit	5	Unit	100%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	4	1	%	1	%	100%	5	%	5	%	100%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	Kegiatan	4	4	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	5	Kegiatan	5	Kegiatan	100%
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perancangan	Laporan	4	4	1	Laporan	1	Laporan	100%	5	Laporan	5	Laporan	100%
7	01	03			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase gangguan trantibum yang dapat	%	100	0	-	%	-	%	#DIV/0 !	4	%	0	%	0%

					KETERTIBAN UMUM	diselesaikan													
7	01	03	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	Desa	4	0	-	Desa	-	Desa	#DIV/0!	4	Desa	0	Desa	0%
7	01	03	2.01	0003	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah hasil Koordinasi Harmonisasi hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	0	-	Laporan	0	Laporan	#DIV/0!	4	Laporan	0	Laporan	0%
7	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	Kegiatan	180	0	-	Kegiatan	-	Kegiatan	#DIV/0!	180	Kegiatan	0	Kegiatan	0%
7	01	04	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	Kegiatan	180	0	-	Kegiatan	-	Kegiatan	#DIV/0!	180	Kegiatan	0	Kegiatan	0%
7	01	04	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	180	0	-	Orang	0	Orang	#DIV/0!	180	Orang	0	Orang	0%
7	01	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	100	4	1	%	1	%	100%	5	%	5	%	100%
7	01	05	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	%	100	4	1	%	1	%	100%	5	%	5	%	100%
7	01	05	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	1	Laporan	1	Laporan	100%	5	Laporan	5	Laporan	100%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	3	1	%	1	%	100%	9	%	4	%	44%

7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparat desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	%	100	3	1	%	1	%	100%	9	%	4	%	44%
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	4	0	0	Dokumen	0	Dokumen	#DIV/0!	4	Dokumen	0	Dokumen	0%
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penda- yagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penda- yagunaan Aset Desa	Dokumen	4	3	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	5	Dokumen	4	Dokumen	80%



Tulis, 8 Juli 2024
Camat Tulis,

JOKO PRASETIJO, SKM. M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19701113 199103 1 008

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Tulis mengalami peningkatan. Ada 4 indikator pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tulis selama periode Renstra 2023-2026 :

1. Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan;
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan pemerintahan umum
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat
4. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Tulis tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Kecamatan Tulis meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

❖ Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Batang.

Berdasarkan Perubahan atas Peraturan Bupati Batang nomor 65 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang menjadi Peraturan Bupati Batang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Tulis adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program & Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan Tulis mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

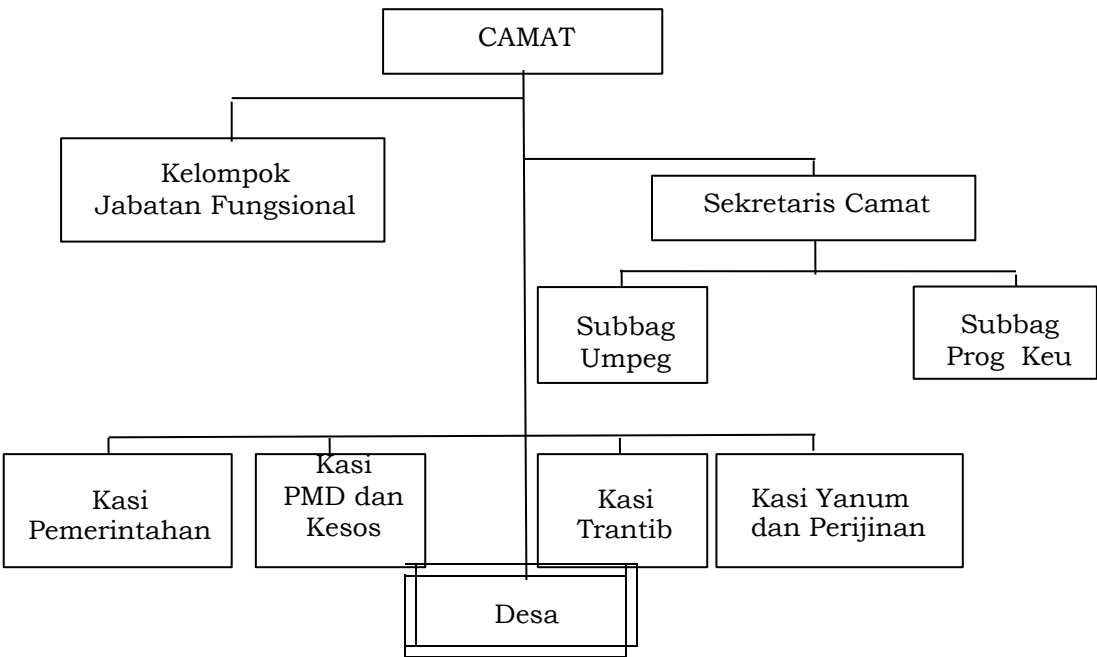
- 1) Perijinan;
- 2) Rekomendasi;
- 3) Koordinasi;
- 4) Pembinaan;
- 5) Pengawasan;
- 6) Fasilitasi;

- 7) Penetapan;
- 8) Penyelenggaraan;
- 9) Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranadan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Tulis
Kabupaten Batang



Sumber : Peraturan Bupati Batang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Tulis
Kabupaten Batang

No.	Sasaran	Indikator Kerja Utama	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan		35,29	35,29	47,05	58,82	35,29	35,29	47,05	58,82	Peningkatan Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan 7,69%
2	Meningkatnya koordinasi ke-tentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		100	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 0,10%
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat		88,7	88,7	89	92,89	88,7	88,7	89	92,89	Peningkatan Skor Indeks Kepuasan Masyarakat 2,1%
		Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik		3,55	3,57	3,57	3,80	3,55	3,57	3,57	3,80	Peningkatan Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik 0,23%
4	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengelolaan administrasi	Nilai SAKIP OPD		59,71	68,1	68,1	72	59,71	68,1	68,1	72	Peningkatan Nilai SAKIP OPD 4,1%
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun		16,66	25	40	50	16,66	25	40	50	Peningkatan Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun 13,48%

Tulis, 8 Juli 2024
Camat Tulis,

JOKO PRASETIJO, SKM. M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19701113 199103 1 008

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Potret kondisi atau gambaran umum pelayanan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Batang. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan. Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan antara lain :

1. Sekretariat Kecamatan

- a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa dan Kelurahan;
- b. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya disiplin aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemungutan PBB;
- b. Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah;
- c. Fasilitasi program dan kegiatan Desa (ADD);
- d. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa dan Kelurahan.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

- a. Kesadaran dalam pemeliharaan hasil pembangunan masih rendah;
- b. Minimnya dukungan anggaran pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
- e. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
- f. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
- g. Meningkatnya angka kekerasan terhadap anak dan rumah tangga;
- h. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLSSM, dll);
- i. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- j. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.

4. Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan Terpadu

- a. Kurangnya sarana dan prasarana PATEN;
- b. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana masih rendah;
- b. Masih banyaknya tawuran dan perkelahian antar warga;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam antisipasi dini bencana;
- d. Kurangnya perhatian terhadap Hansip Desa-desa yang memadai;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM ASN pemerintah kecamatan dan desa dengan pelaksanaan diklat/bimtek
2. Meningkatkan ketersediaan Dokumen-dokumen Perencanaan, LkjIP, Laporan Keuangan.
3. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan aparatur desa dalam pemungutan PBB.
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik.
6. Mengajukan promosi jabatan untuk pegawai yang berkompetensi.
7. Merangkul masyarakat untuk turut serta dalam rencana pembangunan lewat kegiatan musrenbangdes maupun musrenbangcam.
8. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
9. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
10. Sering melakukan koordinasi antar pemerintah desa dan instansi-instansi terkait untuk monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
11. Memaksimalkan kemampuan sumber daya perencanaan dengan diikutkan diklat-diklat perencanaan pembangunan.
12. Melakukan kegiatan pembinaan mitigasi bencana alam kepada masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menghasilkan suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2023.

TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Batang

SKPD KECAMATAN TULIS						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode						Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
7	1	1	1			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
7	0	0	2.0	00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tulis	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bln	1.491.070.151	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tulis	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bln	1.491.070,151	
						Pelaksanaan		Terlaksananya			Pelaksanaan	Kecamatan Tulis	Terlaksananya			
7	0	0	2.0	00		Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	atan Tulis	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	13.440.000	Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	13.440.000	
7	0	0	2.0	00		Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Tulis	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	12 dok	7.680.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Tulis	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	12 dok	7.680.000	
7	0	0	2.0	00		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	atan Tulis	penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 lap	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	an Tulis	penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 lap	0	
7	0	0	2.0	00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
7	0	0	2.0	00		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Tulis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Tulis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	
7	0	0	2.0	00		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	atan Tulis	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	45 Orang	54.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	an Tulis	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	45 Orang	54.000.000	-

7	0	0	2.0	00		Bimbingan Implementasi Perundang- undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	30 Orang	5.000.000		Bimbingan Implementasi Perundang- undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	30 Orang	5.000.000	
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7	1	1	6		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamat an Tulis	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	4.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamat an Tulis	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	4.600.000	
7	0	0	2.0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamat an Tulis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	85.580.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamat an Tulis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	85.580.000	
7	0	0	2.0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamat an Tulis	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamat an Tulis	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Paket	35.000.000	
7	0	0	2.0		Penyediaan Barang	Kecamat an Tulis	Tersedianya barang	1 Paket	6.925.300	Penyediaan Barang	Kecamat an Tulis	Tersedianya barang	1 Paket	6.595.000	
7	1	1	6	05	Cetakan dan Penggandaan	Wonot unggal	dan penggandaan			Cetakan dan Penggandaan	Wonot unggal	dan penggandaan			
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan	Kecamat an Tulis	Tersedianya bahan bacaan			Penyediaan Bahan Bacaan	Kecamat an Tulis	Tersedianya bahan bacaan			
7	0	0	2.0	00	Penyelenggaraan rapat	Kecamat an Tulis	Terselenggaranya rapat			Penyelenggaraan rapat	Kecamat an Tulis	Terselenggaranya rapat			
7	1	1	6	09	SKPD	SKPD	koordinasi dan konsultasi	12 lap		SKPD	SKPD	koordinasi dan konsultasi	12 lap		
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
7	1	1	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
7															
7															
7	1	1	7	11	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tulis	gedung kantor atau bangunan lainnya		18.547.000	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tulis	gedung kantor atau bangunan lainnya		18.547.000	
12 lap	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
12 lap	1	1	8	01	Penyediaan jasa surat Menyurat	Kecamat an Tulis	Penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	1.875.000	Penyediaan jasa surat Menyurat	Kecamat an Tulis	Penyediaan jasa surat menyurat			

7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	unggal Kecamatan Tulis	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12 lap	28.370.660	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ggal Kecamatan Tulisun	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12 lap	23.569.960
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	unggal Kecamatan Tulis	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 lap	34.666.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ggal Kecamatan Tulisun	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 lap	34.802.100
7	0	0	2.0		unggal					ggal				
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kecamatan Pemeliharaan Tulis	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan naiaik kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	5 Unit	55.553.500	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tulis	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	5 Unit	56.793.500
7	0	0	2.0	00	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tulis	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	1 Unit	3.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Tulis	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	1 Unit	-
7	0	0	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulis	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas dan bangunan lainnya.	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulis	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas dan bangunan lainnya.	1 Unit	
7	0	0	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulis	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulis	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	9.480.000
7	0	0	2.0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7	0	0	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7	0	0	2.0	00	Koordinasi/Sinergi, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Kecamatan Tulis	Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perangkian	1 Lap	25.149.000	Koordinasi/Sinergi, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Kecamatan Tulis	Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perangkian	1 Lap	25.086.100
7	0	0	2.0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

	7	0	0	2.0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
	7	1	3	1	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tulis	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tulis	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap	5.000.000
	7	0	0		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
	7	1	4		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
	7	1	4	1	00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tulis	Jumlah hasil Koordinasi Harmonisasi hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Lap	10.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tulis	Jumlah hasil Koordinasi Harmonisasi hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Lap	10.000.000
	7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	7	0	0	2.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					
	7	1	5	1	00	Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Kecamatan Tulis	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)			Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Kecamatan Tulis	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)		
	7	0	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
	7	0	0	2.0	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					
	7	1	6	1	00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Pengelolaan	Kecamatan Tulis	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dok	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Tulis	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dok	0
	7	0	0	2.0	00	Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Tulis	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dok	14.000.000	Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Tulis	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dok	14.000.000

2.028.820.151

2.028.820.151

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan kepentingan dan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat untuk mendukung kemajuan dan daya saing daerah antara lain untuk menyusun perencanaan ekonomi untuk menghadapi tantangan 2022, antara lain untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan pengangguran dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyusunan masterplan pengembangan kawasan agropolitan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi daerah/lokal, dan sebagainya. Disamping itu, program perencanaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan perlu mendapat perhatian lebih, seperti koordinasi dan perencanaan program kesehatan, masalah sosial dan pemberdayaan lansia, perencanaan dan koordinasi percepatan desa-desa unggulan se Kecamatan Tulis dan lain sebagainya yang pada akhirnya ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di wilayah Kecamatan Tulis.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat desa yang bermusyawarah dalam musrenbang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Tulis yang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, Kecamatan Tulis tidak mengakomodir usulan para pemangku kepentingan sehingga tidak ada usulan yang masuk ke Renja Kecamatan Tulis Tahun 2023. Semua usulan diakomodir langsung oleh dinas-dinas terkait sesuai dengan tupoksi dan fungsinya

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 tercantum pada Tabel T.C - 32

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Batang

SKPD KECAMATAN TULIS

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Jembatan Penghubung De- sa Posong-Desa Siberuk	Desa Posong-Desa Siberuk	Terlaksananya Pembangunan Jalan Penghubung antar Desa	1.050.776.000	1 Paket	Sumber Dana PIK
2	Rehab Bendung dan Normalisasi Sungai Sigelap Desa Beji	Desa Beji	Terlaksananya Rehab Bendung dan Normalisasi Sungai Sigelap Desa Beji	750.000.000	1 Paket	DPU-PR
3	Pembangunan Jembatan Penghubung anat Desa Kedungsegog dan Desa Jrakahpayung	Desa Kedungsegog-Desa Jrakahpayung	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Penghubung anat Desa Kedungsegog dan Desa Jrakahpayung	3.000.000.000	1 Paket	DPU-PR
4	Rehab aspal Jalan Penghubung Desa Cluwuk – Desa Kebumen dan Desa Clapar	Desa Cluwuk, Kebumen dan Clapar	Terlaksananya Rehab aspal Jalan Penghubung Desa Cluwuk – Desa Kebumen dan Desa Clapar	1.350.000.000	1 Paket	DPU-PR
5	Pembangunan Talud Irigasi saluran Blok Pabrik Desa Kenconorejo	Desa Kenconorejo	Pembangunan Talud Irigasi saluran Blok Pabrik Desa Kenconorejo	949.730.000	1 Paket	DPU-PR
6	Pembangunan Talud Irigasi dan Pintu air saluran irigasi Gondang leses Desa Sim- bangdesa	Desa Simbangdesa	Terlaksananya Pembangunan Talud Irigasi dan Pintu air saluran irigasi Gondang leses Desa Sim- bangdesa	350.000.000	1 Paket	DPU-PR



Tulis, 8 Juli 2024
Camat Tulis,

JOKO PRASETIJO, SKM. M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19701113 199103 1 008



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan keuangan Kabupaten Batang sejak Tahun 2021 mengamanatkan prinsip dasar dalam penyusunan APBD adalah:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- f. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- g. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Batang harus berupaya menggali berbagai potensi pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini dicanangkan dengan harapan secara bertahap, Kabupaten Batang mampu meningkatkan kemampuannya dalam kemandirian keuangan daerah, utamanya dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah.

Beberapa langkah yang ditempuh sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan melalui intensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan dikelola secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya langkah lainnya adalah melalui ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar.

Untuk mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Batang, maka diperlukan langkah - langkah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi berbagai pungutan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Penyesuaian tariff pajak dan penyesuaian dasar npengenaan pajak tertentu;
- d. Peningkjatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
- e. Membangun system dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online system;
- f. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan seta profesonalisme SDM Aparatur;
- g. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak maupun dana bagi hasil bukan pajak;
- h. Optimsalisi danm pemberdayaan asset daerah;
- i. Meningkatkan kualitas manajemen asset daerah;
- j. Otimalisasi Badan usaha Milik Daerah;
- k. Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan;

Dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan atau pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban. Khusus pada bagian ini, diarahkan pada pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Batang untuk kondisi tahun anggaran 2017-2022.

Analisis tentang Pendapatan Daerah tidak hanya sekedar melakukan analisis atas perkembangan yang dicapai, namun juga bagaimana pengelolaannya. Hal demikian perlu dilakukan karena pertumbuhan yang rendah dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, sehingga diperlukan langkah-langkah antisipasi berupa manajemen atau pengelolaan Pendapatan Daerah. Hasil pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022. Perkembangan- perkembangan yang dicapai mencerminkan kemajuan atas kinerja dan keberhasilan dalam mengoperasionalkan kebijakan yang sudah ditetapkan selengkapny dijelaskan sebagai berikut :

bahwa kondisi Pendapatan Daerah dalam kategori tinggi dengan capaian realisasi 79,57% atau tidak tercapai sebesar Rp 448.424.557.820,- Kondisi ini di sebabkan karena target pendapatan asli daerah hanya tercapai 83,23%. Atau tidak tercapai sebesar Rp 60.647.616.636,-. Bahkan komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki capaian yang sangat rendah di akhir periode RPJMD. Capaiannya hanya 0,20% atau tidak tecapai sebesar Rp 497.492.751.442,- Satu-Santunya komponen pendapatan Daerah yang mencapai target pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan. Dana Perimbangan hingga akhir periode RPJMD

tercapai 108.22 (Kategori Sangat Tinggi). Dengan kata lain, Dana Perimbangan mampu mencapai melebihi target sebesar Rp. 109.715.810.259,-.

Jika komponen pendapatan daerah hanya tergantung pada dana perimbangan, analisisnya dapat mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Ketergantungan terhadap pihak lain: Analisis dapat menyoroti tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak lain, terutama pemerintah pusat. Jika dana perimbangan merupakan sumber utamapendapatan, hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan dan alokasi dana dari pemerintah pusat.
2. Ketidakpastian pendapatan: Daerah yang hanya mengandalkan dana perimbangan memiliki risiko yang tinggi terhadap fluktuasi kebijakan pemerintah pusat. Jika kebijakan perimbangan berubah atau dana dikurangi, pendapatan daerah dapat terpengaruh secara signifikan. Analisis dapat mencakup evaluasi terhadap stabilitas dan keberlanjutan pendapatan daerah dalam jangka panjang.
3. Keterbatasan pengelolaan keuangan daerah: Ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan dapat mengurangi insentif bagi daerah untuk mengelola keuangannya secara efektif dan efisien. Analisis dapat mengevaluasi kapasitas daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangan yang ada.
4. Potensi diversifikasi pendapatan: Analisis juga dapat mencakup penilaian terhadap potensi daerah untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya. Dengan mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dan memperkuat kemandirian keuangan.
5. Keberlanjutan keuangan daerah: Dalam jangka panjang, daerah perlu memastikan keberlanjutan keuangan mereka. Analisis dapat melibatkan penilaian terhadap langkah-langkah yang dapat diambil oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka, seperti pengembangan sumber daya lokal, peningkatan investasi, atau upaya lain untuk mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan.

3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RENJA SKPD Kecamatan Tulis Kabupaten Batang

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam

rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Tulis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Tulis yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2023 perlu memperhatikan ketentuan regulasi perencanaan yang ada, dengan mengingat bahwa Tahun 2023 belum terpilih Bupati definitif dan belum disusun RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 maka, penyusunan RKPD Tahun 2023 mendasari pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025, pada tahapan RPD (Tahun 2023-2026) dengan 3 Tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Kemandirian Desa.
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat.
3. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RPD Kecamatan Tulis, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goal*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari RPD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi RPD untuk kurun satu sampai empat tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun Sasaran Pemerintah Kecamatan Tulis adalah :

1. Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan.
2. Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi

Perangkat Daerah

Strategi dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun arah kebijakan Pemerintah Kecamatan Tulis adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
6. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

13. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
14. Pengadaan Mebel
15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum.
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Pemeliharaan Mebel
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
23. Koordinasi/Sinergi, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal
24. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
25. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
26. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
27. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
28. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan, tercantum pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

Tujuan 1 : Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan	Sasaran 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026	
Tujuan 2 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)		
	Sasaran 2 : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal
Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kantor Camat Tulis tahun 2025 disusun berdasarkan pada tupoksi Kantor Camat Tulis Kabupaten Batang. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan hasil Penetapan KUA PPAS tahun 2025. Adapun program ada sebanyak 6, kegiatan sebanyak 12 dan Sub kegiatan sebanyak 28. Perencanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan hasil Penetapan KUA PPAS. *tercantum pada table TC. 33.*

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Batang
Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Tulis

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TULIS
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TULIS

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Perkiraan Maju Rencana Tahun	
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					KECAMATAN TULIS							2.028.020.151
7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.028.020.151
7	01				KECAMATAN							2.028.020.151
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1.948.020.151
7	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5.000.000
7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 bulan Orang/bulan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan Orang/bulan	5.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.504.510.151
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 bulan Orang/bulan	1.491.070.151	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan Orang/bulan	1.491.070.151
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 bulan Dokumen	13.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan Dokumen	13.440.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							7.680.000
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Batang, Tulis, Semua Kel/Desa	12 bulan Dokumen	7.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan Dokumen	7.680.000
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Batang, Tulis, Semua Kel/Desa	12 bulan Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan Laporan	0
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							68.000.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Batang, Tulis, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	9.000.000

7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Batang, Tulis, Semua Kel/Desa	100 Orang	54.000.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		100 Orang	54.000.000
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Batang, Tulis, Semua Kel/Desa	15 Orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Orang	5.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				156.640.000				68.779.600
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Batang, Tulis, Semua Kel/Desa	1 Paket	4.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	4.600.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Batang, Tulis, Semua Kel/Desa	1 Paket	85.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	85.580.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Batang, Tulis, Semua Kel/Desa	1 Paket	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	35.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Batang, Tulis, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	960.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	25.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	25.500.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0				0
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	0	0		0	0
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	0	0		0	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.990.000				67.990.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Batang, Tulis, Semua Kel/Desa	24 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	2.000.000

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	17.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	17.640.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	48.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	48.350.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				139.000.000				139.000.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	115.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	115.000.000
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	- Kab. Batang, Tulis, Semua Kel/Desa	1 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	19.000.000
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Batang, Tulis, Semua Kel/Desa	0 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	5.000.000
					URUSAN				75.000.000				75.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				25.000.000				25.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25.000.000				25.000.000
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	25.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				10.000.000				10.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				10.000.000				10.000.000

7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				13.000.000				13.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13.000.000				13.000.000
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	13.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				13.000.000				13.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				13.000.000				13.000.000
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Orang	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Orang	13.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				14.000.000				14.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				14.000.000				14.000.000
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	14.000.000
TOTAL									2.028.820.151				2.028.820.151



Tulis, 8 Juli 2024
Camat Tulis,

JOKO PRASETIJO, SKM. M.Kes
NIP. 19701113 199103 1 008

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Program dan kegiatan Kecamatan Tulis tahun 2025 sejumlah 6 (enam) Program, Adapun dari Program-program tersebut yang dapat terangkan yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program dan Kegiatan disusun berdasarkan pada tupoksi Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dengan mengacu Rencana Strategis Rencana Pembangunan Daerah (Renstra RPD) 2023-2026. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.		
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	a)	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Sektoral Statistik Daerah	
		Indikator Kinerja	: Tersedianya Peningkatan Evektifitas
		Target Capaian	: Terlaksananya Penyelenggaran Walidata Pen-
		Kebutuhan Dana	: Rp. 5.000.000,-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	a)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Indikator Kinerja	: Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
		Target Capaian	: Gaji PNS Kecamatan Tulis selama 12 bulan
		Kebutuhan Dana	: Rp. 1.491.070.151,-
	b)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	
		Indikator Kinerja	: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Target Capaian	: Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Kebutuhan Dana	: Rp. 13.440.000,-
2.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	a)	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
		Indikator Kinerja	: Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD.
		Target Capaian	: Tersedianya dana jasa Pengamanan kantor selama 1 tahun.
		Kebutuhan Dana	: Rp. 7.680.000 ,-
	b)	Sub KegiatanPenatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Indikator Kinerja	: Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
		Target Capaian	: Honorarium pengelola keuangan dan pengurus barang
		Kebutuhan Dana	: Rp. 0,-
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.		
	a)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta

		Indikator Kinerja	:	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
		Target Capaian Kinerja	:	Meningkatkan Pemahaman Aparatur Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 54.000.000,-
	c)	Sub KegiatanBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		
		Indikator Kinerja	:	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
		Target Capaian Kinerja	:	Meningkatkan Pemahaman ASN terhadap Peraturan Perundang-undangan.
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 5.000.000,-
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	a)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		
		Indikator Kinerja	:	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
		Target Capaian Kinerja	:	Penerangan kantor dan instalasi listrik selama 1 tahun
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 4.600.000,-
	b)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		Indikator Kinerja	:	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
		Target Capaian Kinerja	:	Kelancaran administrasi perkantoran selama 12 bulan
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 84.860.000,-
	c)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.		
		Indikator Kinerja	:	Tersedianyan bahan logistik kantor.
		Target Capaian Kinerja	:	Kelancaran dan kelayakan dalam pelaksanaan rapat-rapat selama 1 tahun
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 35.000.000,-
	d).	Sub KegiatanPenyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
		Indikator Kinerja	:	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
		Target Capaian Kinerja	:	Kelancaran laporan, dokumen, fotocopy selama 1 tahun.
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 5.000.000,-
	e).	Sub KegiatanPenyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan		
		Indikator Kinerja	:	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
		Target Capaian Kinerja	:	Meningkatnya pengetahuan dan informasi
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 960.000,-
	f)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		
		Indikator Kinerja	:	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
		Target Capaian Kinerja	:	Tercapainya mobilitas dan koordinasi yang mantap.
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 40.420.000,-
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	a)	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		
		Indikator Kinerja	:	Tersedianya mebel
		Target Capaian Kinerja	:	Belanja Modal meubelair
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 0,-
	b)	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
		Indikator Kinerja	:	Tersedianya sarana dan prasarana

				pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
		Target Kinerja	Capaian	: Pemeliharaan gedung kantor
		Kebutuhan Dana		: Rp. 0,-
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.			
	a)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
		Indikator Kinerja	:	Terlaksananya jasa surat menyurat.
		Target Kinerja	Capaian	: Jasa surat menyurat / benda pos selama 1 tahun.
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 2.000.000,-
	b)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		Indikator Kinerja	:	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
		Target Kinerja	Capaian	: Tersedianya telepon dan listrik kantor selama 1 tahun.
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 12.840.000,-
	d)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.		
		Indikator Kinerja	:	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor.
		Target Kinerja	Capaian	: Tersedianya dana jasa Kebersihan kantor dan bahan pembersih selama 1 tahun.
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 48.350.000,-
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.			
	a).	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan.		
		Indikator Kinerja	:	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
		Target Kinerja	Capaian	: Tersedianya dana pembayaran Pajak perpanjangan STNK dalam 1 tahun
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 115.000.000,-
	b)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		
		Indikator Kinerja	:	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
		Target Kinerja	Capaian	: Pemeliharaan Meubelair
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 0,-
	c)	Sub Kegiatan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.		
		Indikator Kinerja	:	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas dan bangunan lainnya.
		Target Kinerja	Capaian	: Terpeliharanya Kantor dinas dan gedung kantor selama 1 tahun.
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 19.000.000,-
	d)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.		
		Indikator Kinerja	:	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
		Target Kinerja	Capaian	: Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12 bulan
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 5.000.000,-
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
1.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.			
	a)	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.		

		Indikator Kinerja	:	Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perancangan
		Target Capaian Kinerja	:	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 21.000.000,-
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	a)	Sub Kegiatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Target Capaian Kinerja	:	Pelatihan dan rakor PKK
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 5.000.000,-
	b)	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
		Target Capaian Kinerja	:	Sosialisasi Kepala Keluarga dan Tokoh Masyarakat.
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 14.000.000,-
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	a)	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah hasil Koordinasi Harmonisasi hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		Target Capaian Kinerja	:	Sosialisasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 12.600.000,-
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	a)	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
		Target Capaian Kinerja	:	Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 13.000.000,-
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA.			
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	a)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		Target Capaian Kinerja	:	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		Kebutuhan Dana	:	Rp. 15.000.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Batang Tahun 2024.

❖ Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, seksi-seksi dan seluruh staf Kecamatan Tulis Kabupaten Batang secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

❖ Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

❖ Catatan Penting

Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renja 2025 diharapkan dilaksanakan sesuai dengan Rencana dan Kaidah yang telah direncanakan mengacu pada KUA PPAS yang telah ditetapkan.



Tulis, 8 Juli 2024
Camat Tulis,

JOKO PRASETIJO, SKM. M.Kes

Pembina Tk I

NIP. 19701113 199103 1 008